

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM  
PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI  
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
(Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bidang Ilmu-Ilmu  
Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DESMAWARNI**  
NPM ;157310010

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan saya Ucapkan dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Sisingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung)”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogya,S.IP.,M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si selaku Ketua jurusan program studi Ilmu Pemerintahan Dan seluruh Dosen yang mengajar program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Soasial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman S.Sos ,. M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Budi Muliando.,S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu,pikiran dan tenaga demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Iskandar dan Ibu Ernawati serta kakanda Ahmad Darwis, Abdurrahman dan Yuliana S.Pd atas kerja keras dan Doa yang tidak ternilai harganya, banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti dan memberikan fasilitas dalam pembuatan usulan penelitian ini.

9. Kepada Teman-Teman seperjuangan saya di prodi ilmu pemerintahan yang telah banyak membantu saya untuk berkembang didalam memahami ilmu-ilmu yang sedang di pelajari, khususnya ilmu pemerintahan.

10. Teruntuk kepada sahabat terdekatku Wiwit safitri terima kasih telah memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan penelitian ini dan sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan saat di repotkan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian penelitian ini selalu di berikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah di perjuangkan.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Juli 2019

Penulis

**Desmawarni**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>18</b>
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	21
3. Konsep Peranan.....	23
4. Konsep Pembinaan.....	25
5. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini .....	29
6. Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pemikiran .....	40
D. Populasi Penelitian .....	40
E. Konsep Operasional .....	40
F. Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan Penelitian .....	44
D. Teknik Penarikan Informan.....	45
E. Jenis Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47

<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Singkat .....	48
1. Gambaran Umum Kuantan Singingi .....	48
2. Gambaran Umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	50
B. Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi .....	51
a. Rencana Strategis .....	52
b. Visi dan Misi .....	53
C. Struktur Organisasi .....	56
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singing .....	57
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>63</b>
A. Identitas Informan .....	63
1. Jenis Kelamin Informan .....	63
2. Usia Informan .....	64
3. Pendidikan Informan .....	65
B. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung).....	66
1. Perencanaan .....	66
2. Bimbingan .....	74
3. Pengarahan.....	81
4. Pelatihan .....	89
 <b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	 <b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	 <b>106</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	 <b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sekabupaten Kuantan Singingi.....	9
I.2 : Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sekecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	10
I.3 : Data Jumlah Penduduk Koto Tinggi dan Padang Tanggung Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	12
II.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian sekarang...	36
II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
III.1 : Informan Penelitian.....	44
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
IV.1 : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
IV.2 : Rumusan Masalah Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran. ....	40
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.....	54



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desmawarni  
Npm : 157310010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, Juli 2019

Desmawarni

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM  
PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI  
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi  
Pada Desa Kota Tinggi dan Desa Padang Tanggung)**

**ABSTRAK**

DESMAWARNI

157310010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan faktor-faktor penghambat peranan Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga dalam pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung). Indikator penilaian pembinaan Lembaga Pendidikan anak usia dini yang digunakan meliputi, perencanaan, bimbingan, pengarahan, dan pelatihan. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dikumpulkan berupa kata-kata, catatan lapangan, foto wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dan identifikasikan, diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat enam informan pada penelitian ini, Kepala Dinas Pendidikan bagian Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Sekolah Koto Tinggi, Kepala Sekolah Padang Tanggung, Guru sekolah Koto Tinggi, Guru Sekolah Padang Tanggung dan Orang Tua Wali Murid. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder, struktur organisasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, data data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Peranan Dinas Pendidikan dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini masih kurang optimal.

Kata Kunci : Pembinaan, Pendidikan Anak Usia Dini.

**THE ROLE OF YOUTH AND SPORTS EDUCATION IN THE  
DEVELOPMENT OF EARLY CHILDREN INSTITUTION IN PANGEAN  
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT (Study of Kota Tinggi  
Village and Padang Tanggung Village)**

**ABSTRACT**

DESMAWARNI

157310010

This study aims to determine the role of the Department of Education in fostering Early Childhood Education Institutions in Pangean Subdistrict Kuntan Singingi Regency (Study of Koto Tinggi Village and Padang Tanggung Village). Assessment indicators for the development of early childhood education institutions that are used include, planning, guidance, direction, and training. This type of research located in Koto Tinggi Village and Padang Tanggung Village is qualitative descriptive, which is collected in the form of words, field notes, interview photos, observations and documentation as a data collection tool, and identified, in accordance with the research objectives. There were six informants in this study, the Head of the Education Office for Early Childhood Education, the Head of the Koto Tinggi School, the Head of the Padang Tanggung School, Koto Tinggi School Teacher, Padang Tanggung School Teacher and Parents of Guardian Students. The type of data collection consists of primary data, secondary data, organizational structure in the field of Early Childhood Education. While the technical analysis of data is clarified with the results of interviews, observation, documentation, data data is processed and analyzed to describe the objectives of the study, then compared with theories relating to the title of the researcher to conclude that the role of the Education Agency in the Development of Early Childhood Education Institutions is still less optimal.

*Key Word : fostering early childhood education*

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desmawarni  
Npm : 157310010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, Juli 2019

Desmawarni

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM  
PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI  
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi  
Pada Desa Kota Tinggi dan Desa Padang Tanggung)**

**ABSTRAK**

DESMAWARNI

157310010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan faktor-faktor penghambat peranan Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga dalam pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung). Indikator penilaian pembinaan Lembaga Pendidikan anak usia dini yang digunakan meliputi, perencanaan, bimbingan, pengarahan, dan pelatihan. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dikumpulkan berupa kata-kata, catatan lapangan, foto wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data, dan identifikasikan, diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat enam informan pada penelitian ini, Kepala Dinas Pendidikan bagian Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Sekolah Koto Tinggi, Kepala Sekolah Padang Tanggung, Guru sekolah Koto Tinggi, Guru Sekolah Padang Tanggung dan Orang Tua Wali Murid. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder, struktur organisasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, data data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Peranan Dinas Pendidikan dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini masih kurang optimal.

Kata Kunci : Pembinaan, Pendidikan Anak Usia Dini.

**THE ROLE OF YOUTH AND SPORTS EDUCATION IN THE  
DEVELOPMENT OF EARLY CHILDREN INSTITUTION IN PANGEAN  
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT (Study of Kota Tinggi  
Village and Padang Tanggung Village)**

**ABSTRACT**

DESMAWARNI

157310010

This study aims to determine the role of the Department of Education in fostering Early Childhood Education Institutions in PangeanSubdistrictKuntanSingingi Regency (Study of Koto Tinggi Village and Padang Tanggung Village). Assessment indicators for the development of early childhood education institutions that are used include, planning, guidance, direction, and training. This type of research located in Koto Tinggi Village and Padang Tanggung Village is qualitative descriptive, which is collected in the form of words, field notes, interview photos, observations and documentation as a data collection tool, and identified, in accordance with the research objectives. There were six informants in this study, the Head of the Education Office for Early Childhood Education, the Head of the Koto Tinggi School, the Head of the Padang Tanggung School, Koto Tinggi School Teacher, Padang Tanggung School Teacher and Parents of Guardian Students. The type of data collection consists of primary data, secondary data, organizational structure in the field of Early Childhood Education. While the technical analysis of data is clarified with the results of interviews, observation, documentation, data data is processed and analyzed to describe the objectives of the study, then compared with theories relating to the title of the researcher to conclude that the role of the Education Agency in the Development of Early Childhood Education Institutions is still less optimal.

*Key Word : fostering early childhood education*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan dengan memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Tentu saja dibentuknya sebuah Negara ialah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam konstitusi mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 alenia keempat. Berarti bahwa Negara Wajib melayani warga Negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S. Sayre (Syafiie 2008:11) adalah sebagai organisasi dan Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen.

Dalam menjalankan perannya, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Otonomi daerah menurut undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Seiring berubahannya susunan pemerintahan daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pada pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan
3. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(2) meliputi:

- a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informasi;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kependudukan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;

q. Perpustakaan, dan

r. Kearsipan

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan;
- h. Transmigrasi

Lebih lanjut kedudukan, tugas Dinas pendidikan peraturan Kabupaten Kuantan Singingi No. 41 Tahun 2017 pasal 1 ayat (16) tentang tugas pokok peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan Dinas Pendidikan mempunyai tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Dari penjelasan tugas Dinas Pendidikan diatas ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 29 tentang sistem Pendidikan Nasional

1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
2. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
3. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Peraturan Menteri Pendidikan No.4 Tahun 2018 pasal 1 ayat (3) menyatakan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkemabangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan bangsa kita (indonesia) terutama keluarga.

Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan demi mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Dalam hal ini persiapan dalam menghadapi persaingan dunia luar perlu dipupuk sejak dini mungkin karena Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang sangat mendasar. Salah satunya dengan pengenalan belajar sambil bermain pada anak-anak usia dini yang mana merupakan masa keemasan (*The Golden Age*). Akal sehat bukan diperoleh sejak lahir tapi kita mempelajarinya melalui pengalaman dan praktek (Rich 2008:33).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar daerah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan spiritual), sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut (Prastisi 2008:8) mengatakan bahwa bayi dilahirkan seperti tabula rasa atau kertas kosong,

pikiran anak merupakan hasil dari pengalaman dan proses belajar melalui lingkungan. Latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan karakter individu adalah sebagian di antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang.

Pada usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak (*golden age*).

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu; pertama, tujuan untuk membentuk anak indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan pada masa dewasa; kedua, tujuan untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Anak-anak merupakan pembelajaran yang luar biasa sejak lahir kemampuan paling penting dan berpengaruh bagi masa-masa pra sekolah dan tahun-tahun awal di sekolah dasar adalah kesinambungan anak-anak untuk belajar. Kita harus menyampaikan bahwa pendidikan sangat penting. anak-anak kesiapan untuk belajar adalah tujuan pendidikan yang paling diukur, oleh ukuran biasa. Kesiapan untuk belajar adalah hasil jangka panjang yang paling penting. Hal ini sesuai dengan hak anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang

nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan. Sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2003 BAB 1 pasal 1 ayat 14 yaitu Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan yang ada di daerah. Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dimana saja dan kapan saja bukan berarti penyelenggaraan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan asal-asalan. Pendidikan Anak Usia Dini harus dilaksanakan dengan konsep dan metode yang benar, baik dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini maupun di rumah karena kesalahan mendidik usia dini, mempunyai efek permanen seumur hidup. Pendidik harus membekali diri agar berhasil menjalankan tugas pentingnya mencerdaskan anak usia dini. Disamping itu lembaga pendidik anak usia dini dalam mendidik dan mengasuh anak memerlukan pendidik dan pengasuh yang handal dan profesional. Kondisi tenaga pendidik dan pengasuh yang ada saat ini masih beragam. Oleh sebab itu kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan agar pelayanan anak usia dini lebih berkualitas baik pada aspek pendidikan kebutuhan maupun gizinya.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya d`i Teluk Kuantan. Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, dibagian Utara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan Jambi, Barat Kabupaten Sijunjung dan bagian Timur Kabupaten Indragiri Hulu.

**Tabel I.1: Data Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SeKabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	TK	KB	TPA	SPS
1	Kuantan Hilir Seberang	7	9	0	0
2	Sentajo Raya	16	7	0	1
3	Kuantan Tengah	26	21	2	0
4	Benai	10	14	0	0
5	Hulu Kuantan	12	9	0	0
6	Inuman	11	9	0	0
7	Cerenti	10	15	0	0
8	Logas Tanah Darat	13	5	0	3
9	Singingi Hilir	20	15	0	6
10	Kuantan Hilir	11	11	0	1
11	Kuantan Mudik	15	14	0	0
12	Singingi	13	9	0	1
13	Pangean	4	14	0	3
14	Gunung Toar	10	10	1	3
15	Pucuk Rantau	8	5	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Kabupaten Kuantan Singingi sendiri mempunyai 15 Kecamatan dan 218 Desa. Kabupaten ini mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini disetiap kecamatan, dalam kecamatan tersebut terdapat 1 PAUD didalam 1 Desa. Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kuantan Singingi bertumpu pada 4 layanan yaitu:

1. TK (Taman Kanak-Kanak) adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun
2. KB (Kelompok Bermain) adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun
3. TPA (Taman Penitipan Anak) adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun
4. SPS (Satuan PAUD Sejenis) adalah bentuk penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

**Tabel I.2: Data Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	Desa	Nama Lembaga	Jumlah Murid	Jumlah Tenaga Kependidikan
1	Padang Tanggung	Assaqinah	36	4
2	Pematang	Lavender	25	4
3	Pulau Rengas	Ra askia	25	4
4	Pasar Baru	Bunga Tanjung	25	3
5	Pauangit	Abdilah	20	4
6	Pulau Tengah	Harapan Bunda	34	4
7	Padang Kunik	Matahari	25	3
8	Rawang Binjai	Nurul Hidayah	28	5
9	Koto Tinggi	Mutiara Bunda	19	3
10	Pulau Kumpai	Rafflesia	38	4
11	Teluk pauh	Flamboyan	26	4
12	Sukaping	Pelangi	30	3
13	Penghijauan	Kasih Ibu	20	3
14	Tanah bekali	Ar rahman	30	3

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Di Kabupaten Kuantan

Singingi didirikan Pendidikan Anak Usia Dini. Di Kecamatan Pangean terdapat 14 PAUD. Salah satunya di Desa Koto Tinggi Kecamatan Pangean. PAUD yang didirikan di Desa ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Bunda. Anak murid yang belajar di Mutiara Bunda ini berjumlah 19 orang dan tenaga pendidiknya berjumlah 4 orang. Dan Desa Padang Tanggung juga salah satu desa Kecamatan Pagean yang didirikan sebuah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang muridnya berjumlah 36 murid dan 4 orang tenaga Pendidik. Desa Padang Tanggung adalah Desa yang jumlah muridnya paling banyak dari jumlah PAUD lainnya sementara Desa Koto Tinggi adalah jumlah Yang paling sedikit diantara jumlah PAUD lainnya.

Permendiknas yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, Permendiknas 41/2009 tentang standar pembimbing pada kursus dan pelatihan yaitu: melaksanakan program bimbingan, menyiapkan materi bimbingan sesuai dengan tujuan bimbingan, minat dan kebutuhan warga belajar. Dan permendiknas 42/2009 tentang standar pengelola pada kursus pelatihan, yaitu: menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan bimbingan dan gaya belajar warga.

Program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pelatihan (diklat)

Diklat tersebut ada tiga yaitu diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. Diklat dasar adalah pelatihan yang khusus untuk guru yang berjenjang terakhir Sekolah Menengah Atas, diklat lanjut adalah diklat yang diikuti setelah guru-guru

tersebut mengikuti diklat dasar, dan selanjutnya diklat mahir adalah diklat yang telah di anggap guru-guru tersebut berjenjang terkhir S1 PAUD.

## 2. Jambore

Jambore itu adalah perlombaan guru-guru sekecamatan yang diadakan dikabupaten seperti perlombaan menari, menyanyi. Kurikulum yang digunakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekabupaten Kuantan Singingi adalah kurikulum 2013, yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran tema pembelajaran, pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik kemampuan awal anak.

**Tabel 1.2: Data Jumlah Penduduk Koto Tinggi Dan Padang Tanggung Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Dusun	Jiwa		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Koto Tinggi	202	199	401
2.	Padang tanggung	185	117	302

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Desa Koto Tinggi penduduknya laki-laki berjumlah 202 dan perempuannya berjumlah 199 jumlah seluruhnya adalah 401 sedangkan Desa Padang Tanggung lebih sedikit dari pada jumlah penduduk Koto Tinggi. Jumlah laki-lakinya 185 dan perempuannya 117 jumlah seluruhnya 302.

Syarat- syarat untuk menjadi guru menjadi tenaga pendidik (guru) PAUD telah di atur dalam permendiknas no 16 tahun 2007, di jelaskan bahwa untuk menjadi tenaga pendidik PAUD seseorang harus memiliki kualisi akademik minimum empat atau strata sarjana dalam bidang pindidikan anak usia dini atau psikologi yang di peroleh dari progam studi yang terakreditas. Kualifikasi

akademik tenaga kependidikan PAUD Tenaga kependidikan PAUD bertugas merancang, melaksanakan, mengelola administrasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan program. Didalam Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dijelaskan bahwa:

1. Kualitas Akademik Dan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualitas akademik dan kompetensi guru berserta lampirannya.
2. Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Pendamping
  - a. Kualitas Akademik seperti: Memiliki ijazah D-II PGTK dari perguruan tinggi terakreditasi atau Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi.
  - b. Kompetensi merupakan perpaduan antara kemampuan personal keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme.
3. Standar Tenaga Kependidikan, Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, layanan pendidikan Anak Usia Dini harus dikelola dengan baik. Setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki penanggung jawab yang bertugas merencanakan,

melaksanakan, mengelola administrasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan program. Tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas pengawas, kepala sekolah, pengelola, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan yang diatur oleh masing-masing lembaga sebagai berikut:

- a. Pengawas, Kualifikasi dan kompetensi pengawas Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal didasarkan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah beserta lampirannya.
- b. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan formal Kualifikasi dan kompetensi kepala TK/RA didasarkan pada peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah beserta lampirannya
- c. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nasional Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan non formal adalah penanggung jawaban alam satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal dengan kualifikasi seperti: Minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping, berpengalaman sebagai pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Lulus pelatihan/magang/kursus pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dari lembaga terakreditasi.

- d. Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini seperti: Kualifikasi Akademik memiliki Kualifikasi Akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, Kompetensi.

Dinas Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Permendiknas no 16 tahun 2007, namun di peraturan Kabupaten ini persyaratan guru-guru berjenjang Sekolah Menengah Atas sederajat wajib mengikuti yang namanya diklat atau pelatihan untuk bisa menjadi tenaga pendidik KB, TPA, dan SPS. Dan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan/pendidikan kursus PAUD yang terakreditasi Penulis memfokuskan penelitian ini pada pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi kecamatan Pangean. Disini menemukan beberapa fenomena yang terjadi yaitu:

1. Ijazah terakhir guru tidak sesuai dengan jenjang terakhir. Adanya guru PAUD yang tidak sesuai jenjang terakhir, dengan itu guru-guru tersebut diwajibkan ikut dalam pelatihan (diklat) agar jadi S1 PAUD, namun sebagian guru masih tidak mengikuti diklat tersebut.
2. Jumlah murid di Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi sangat sedikit dibandingkan di Desa Padang Tanggung Kec. Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sementara masyarakat Desa Koto Tinggi padat dibandingkan Desa Padang Tanggung. Karena Wali Murid lebih banyak memilih menitipkan anak mereka di PAUD Desa Padang Tanggung. Desa Padang Tanggung berbatasan dengan Desa Koto Tinggi.

Berdasarkan fenomen-fenomena diatas, peneliti mengidentifikasi masih belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh dinas menyebabkan terjadinya

permasalahan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini sehingga peneliti tertarik untuk berjudul “ **Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto tinggi Dan Desa Padang Tanggung)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang diatas, maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi merupakan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak indonesia melalui cara bermain. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka peneliti fokuskan pada perbandingan jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang sangat sedikit sementara masyarakatnya padat dan jumlah murid yang banyak. Maka dari itu dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “**Bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi Dan Desa Padang Tanggung)**”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Untuk mengetahui fakto-faktor penghambat dalam pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai bahan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama
- b. Merupakan salah satu usaha memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan rujukan, masukan dalam meningkatkan kualitas pendidik dengan pembinaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep pemerintahan

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintah menurut Syafie dalam bukunya kepemimpinan pemerintah indonesia (2003:3) berasal dari kata “perintah” kemudian mendapat imbuhan seperti berikut:

1. Mendapatkan awal “pe-“ menjadi “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.
2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013 :18) pemerintah adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintah adalah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Nadraha (2005:36) pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Ndraha (1997:7) Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik induvidu dengan induvidu, kelompok dengan kelompok, maupun antar induvidu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat.

Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengedalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerjaan (workers). Peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan keteriban umum melalui fungsi eksekutif.

pemerintahan adalah teori yang membentuk pemerintahan, pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana wilayah mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa akhirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkan untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkebangannya, kelompok inilah yang kemudian akan menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada tahap selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas, dengan tujuan yang apa mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat). Atau bahkan atas dasar keinginan dan kehendak mereka sendiri.

Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam pradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun pradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Ndraha (2011:5) Ilmu pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Ndraha (2010:6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Di mana seseorang ataupun suatu kelompok dalam proses atau interaksi social terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut Labolo (2014:1) secara umum Pemerintahan dalam perspektif masih terbatas dikarenakan posisi ilmu pemerintahan yang bersifat transisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum, disebut transisional karena ilmu pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasi dirinya secara tegas dari bayangan-bayangan ilmu tersebut.

Dalam pandangan lain, menurut Inu Kencana Syafiie Brasz (2008:9) ilmu pemeritahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam

maupun keluar terhadap warganya. C. F Strong mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama pemerintah baru:

1. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
2. Harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang
3. Harus mempunyai kekuatan finacil atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

## 2. Konsep manajemen pemerintahan

Istilah manajemen berasal dari kata bahasa Inggris *management*, istilah ini terbentuk dari akar kata *manus* yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti bagaimana menciptakan *effetiveness* usaha (*doing right things*) secara *effeicient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan. (Ndraha 2003:159)

Menurut Siswanto (2005:2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, penforganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja mencapai tujuan.

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen

pemerintah misalnya kekuasaan (*power*), pemerintahan (*government*), maupun pelayanan (*service*) yang dilakukan oleh pemerintahan kepada masyarakat umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan (Horman 2006: 348).

Menurut Dessler (2009:19-20) manajemen pemerintahan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai alat atau perangkat lunak (*software*) yang berada dalam pikiran manusia dan dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas pemerintah. Aktivitas pemerintah dalam suatu negara meliputi:

- a. *Technical activities* (kegiatan teknis);
- b. *Commelcial activities* (kegiatan komersial);
- c. *Financial activities* (kegiatan keuangan);
- d. *Secuity activities* (kegiatan keamanan);
- e. *Accounting activities* (kegiatan akuntansi);
- f. *Managerial activities* (kegiatan manajerial).

Sedangkan untuk penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditambah dua jenis aktivitas lagi yaitu:

- a. Pertanggung jawaban (*accountability*);
- b. Pelayanan (*service*) kepada masyarakat secara adil dan merata.

Dilihat dari sisi praktik atau pelaksanaannya, manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Zaidan (Nawawi 2013:21)

Sedangkan Siagian (1989:13) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintah atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat yang berada pada tingkat daerah.

Kristiadi (1994:15) yang memberikan rumusan manajemen pemerintahan tidak lain faktor upaya dalam suatu organisasi, upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakat.

Menurut Supriyanto (2009:41) manajemen pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintah membuat keputusan-keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atau evaluasi.
2. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

### **3. Konsep Peranan**

Peran sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh manusia yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimasyarakat (depdikbud 2002:243)

Peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sarana yang hendak dicapai, oleh karena

itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesinambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho 2002:220). Peranan adalah sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seorang dalam posisi tertentu

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan suatu sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan menurut Soekanto (2001:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagian struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya peranan menurut Giroth (2004:29) adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan seseorang berbagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari pada anggota penting dalam system social yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki system sosial itu.

Menurut Soekanto (2002:243) pengertian peranan adalah sebagai berikut peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peran.

#### **4. Konsep Pembinaan**

Menurut Efendi (2003:24) pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan atau perbaharuan suatu kondisi pada orang, perorangan, kelompok, maupun dalam aspek biang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial, budaya dan bidang politik, sehingga dengan bidang ini dapat mulai pendidikan itu mencapai maksimal.

Menuut Miftah Thoha (2003:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Menurut Poerwadamita (2004:141) pembinaan adalah yang berasal dari kata bina yang mempunyai arti bangun dan kata membina artinya membangun atau mendirikan sedangkan kata pembina adalah orang atau pelaku yang membina atau membangun. Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan berupa pedoman, pengarahan, bimbingan dan pelatihan.

Menurut Musanef (2000:47) pembinaan adalah segala usaha tindakan yang behubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengadilan segala suatu yang beraya gunadan berhasil guna.

Selanjutnya (Thoha 2008:7) pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu biasa menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Mathis (2002:112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

Lebih lanjut Ismail (2001:167-168) menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

- a. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya relative rendah. Dalam media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima baik menafsir.
- b. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari suatu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan kerumah.
- c. Dengan melakukan pertunjukan atau demoratis. Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang salah satu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.

- d. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tunjukannya khusus memberikan penarangan.

tujuan Pembinaan sebagai berikut:

- a. Pembinaan terhadap pendidik dan membantu pendidik dalam meningkatkan pengembangan profesionalisme pendidik
- b. Pembinaan terhadap pengelola untuk membantu pengelolaan yang lebih efektif dan efisien seperti: Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik serta menciptakan iklim kelompok bermain yang kondusif, Memberi nasehat kepada pengelola, Meningkatkan kemampuan pengelola sebagai penggagas (inovator) kelompok bermain agar mampu mencari, menemukan dan melaksanakan sebagai pembaharuan dilembaga, Meningkatkan kemampuan pengelola sebagai pendorong (motivator) agar mampu mengelola lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja disiplin, dorongan, penghargaan, secara efektif dan penyediaan sebagai sumber bermain.

Ketika pembinaan dijalankan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Obyektif, Pembinaan dilakukan berdasarkan pada kenyataan atas dasar data fakta yang ditemukan di lapangan
- b. Demokratis, Dilakukan dengan sikap yang akrab, hangat, menjunjung tinggi martabat pendidik dan kementrian
- c. Kerjasama, Mengingat mencakup ruang lingkup yang holistik, maka pembinaan perlu menjalin kekompakan dan kebersamaan

- d. Konstruktif Dan Kreatif, Peminaan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, memotivasi dan membangun dengan ide-ide baru, sehingga dapat memotivasi dalam mengembangkan potensi pendidik.
- e. Sistematis, Terencana dan Berkesinambungan, Peminaan perlu dilakukan secara terencana dengan program yang sistematis dan terus menerus sehingga perbaikan dapat dilaksanakan dipantau untuk memberikan usulan-usulan

Peran dan fungsi pembinaan sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan memberikan pantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi kesulitan.
- b. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program.
- c. Membimbing dibidang administrsi lembaga khusus dalam hal pelaporan.
- d. Membantu memecahkan masalah bila ada masalah yang dihadapi pengelola.
- e. Menciptakan suasana yang hangat sehingga tercipta suasana kemitraan yang akrab.

Teknik pembinaan untuk melakukan pembinaan dapat digunakan beberapa teknik antara lain:

- a. Kunjungan Kelas

Kunjungan kelas dapat dilakukan secara berencana dan memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran dan pengelolaan kelas yang dilakukan guru.

b. Observasi Kelas

Observasi kelas dapat dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan guru dan anak dalam proses pembelajaran.

c. Percakapan Pribadi

Pembinaan bisa juga dilakukan melalui percakapan pribadi yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu untuk masalah khusus.

d. Kunjungan Antar Kelas Atau Antar Sekolah

Kunjungan ini dimaksudkan untuk saling bertukar pengalaman dan hal-hal yang berujuan untuk perbaikan pembelajaran.

e. Rapat Rutin

Kegiatan ini dilakukan pembina dengan para guru dalam rangka pembinaan dan sharing untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran dan mengali ide-ide baru agar para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam rapat ini dapat digunakan teknik berdiskusi sehingga muncul sharing pendapat/ide tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembelajaran atau penyelenggaraan.

## **5. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini**

sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2003 BAB 1 pasal 1 ayat 14 yaitu Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan oleh lembaga baik swasta, pemerintah, organisasi, masyarakat maupun perorangan yang memiliki kepedulian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. Setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, baik lembaga maupun program harus memperoleh izin pendirian dari Dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah setempat. Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan bukan saja melalui jalur formal tetapi juga melalui jalur nonformal dan informal dirumah (UU sisdinas No.20/2003).

Sumber daya manusia didalam lembaga Pendidikan Anak Usia Dini meliputi pengorganisasian suatu lembaga, yaitu:

- a. Rekrutmen sumber daya sesuai dengan kebutuhan:
- b. Menyiapkan perangkat dan persiapan rekrutmen
- c. Melaksanakan rekrutmen
- d. Menggambarkan jabatan kerja
- e. Mendistribusikan sumber daya manusia berdasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi
- f. Mengembangkan kompetensi
- g. Melakukan penilaian kerja
- h. Mengembangkan sistem imbalan dengan ganjaran

## **6. Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini**

Dalam dunia pendidikan, pengelolaan atas tenaga ini berorientasi pada pembangunan pendidikan, dimana bidang garapan keluarannya jelas berbeda dari bidang dan keluaran perusahaan dan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik aktifitas dunia pendidikan yang menjadi pembeda dengan aktifitas dibidang lainnya.

Demikian halnya dengan praktik-praktik pengelolaan tenaga pendidik, bagaimanapun tidak dapat disamakan dengan sepenuhnya dengan praktik-praktik pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi lainnya.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini karena pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan satuan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Pendidik Anak Usia Dini semestinya disiapkan secara professional, dimana seorang professional paling tidak mempunyai 3 unsur utama yaitu:

- a. Pendidikan yang memadai, disiapkan secara khusus melalui lembaga pendidikan dengan kualifikasi tertentu
- b. Keahlian dalam bidangnya.
- c. Komitmen dalam tugasnya.

Pendidikan Anak Usia Dini dalam Sumber Daya Manusia Meliputi:

- a. Rekrutmen / Prekrutan Tenaga Kependidikan
- b. Pembinaan
- c. Pemberhentian / Mutasi

Perekrutan tenaga pendidik merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan untuk memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan. Langkah-langkah penting dalam proses perekrutan sebagai kelanjutan perencanaan penting dalam proses prekrutan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga pendidik, yaitu:

- 1) Menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidik dalam berbagai jenis dan kualifikasinya sebagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan, dapat melalui media publikasi atau rekomendasi terbatas, atau kerja sama dengan instansi lain.
- 2) Menentukan persyaratan bagi pelamar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- 3) Menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan.

Standar-standar seleksi misalnya:

- a. Umur Ketrampilan Komunikasi
- b. Kesehatan Fisik Motivasi
- c. Pendidik Minat
- d. Pengalaman Sikap dan nilai-nilai
- e. Tujuan-tujuan Kesehatan Mental

- f. Penampilan kepantasan Bekerja Didunia Pendidikan
- g. Pengetahuan Umum Faktor lain yang ditetapkan penguasa

Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tanaga kependidikan

Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik kependidikan merupakan usaha mendaya gunakan, memajukan an meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan ketrampilan dan pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan suatu program pembinaan tenaga pendidik biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dikalangan tenaga kependidikan itu sendiri. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga pendidik ini, yaitu:

- a. Pendidik tenaga pendidik patut dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik.
- b. Pembinaan tenaga pendidik orientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
- c. Pembinaan tenaga pendidik dilaksanakan untuk mendorong meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidik atau system sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan dan

intensif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan social ekonomi maupun kebutuhan social-psikologis.

- d. Pembinaan tenaga pendidik dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi dimasa yang akan datang (misalnya magang)
- e. Pembinaan tenaga pendidik seharusnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan.

Cara yang lebih populer dalam membina dan mengembangkan tenaga pendidik dilakukan melalui penataran (collaborative effort), misalnya mengikuti kegiatan atau kesempatan, one-service training, on the job training, seminar, orkshop, diskusi panel, rapat-rapat, symposium, konferensi, dan sebagainya.

Pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang tenaga pendidik berhenti dari pekerjaannya (PHK), yaitu:

- a. Penilaian kinerja yang bersangkutan menurun meskipun sudah diberikan peringatan oleh atasan.
- b. Karena permintaan sendiri untuk berhenti.
- c. Karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku.

- d. Karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas disatu pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja.
- e. Karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana, minalnya melanggar peraturan disiplin atau korupsi dan sebagainya.
- f. Karena yang bersangkutan tidak cukup jasmani maupun rohani, seperti cacat karena suatu hal yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja, mengidap penyakit yang membahayakan diri dan lingkungan, berubah ingatan dan sebagainya,
- g. Karena meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
- h. Karena meninggal dunia atau karena hilangan sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- i. Karena izin mengembangkan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1:Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang**

No	Peneliti	Judul	persamaan	Perbedaan
1	Made Febrianto parisiawan	peran Dinas Pendidikan Dan kebudayaan provinsi jawa tengah dalam pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Semarang	metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Metode Pengumpulan Data Observasi Dokumentasi Wawancara	Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Semarang
2	Andi Rifai	Implementasi Kebijakan penyelerangan Pendidikan Anak Usia Dini Di Sulawesi Tengah	Informan Dinas Pendidikan	Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
3	Andri Hadiansyah	Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Emik
4	Suci Ramadani	Manajemen Peserta Didik Pada Taman Pendidikan Anak Usia Dini doa Ibu	Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif	Bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan manajemen manajemen peserta didik di taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5	Suharti	Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran (studi pada PAUD Negeri Pembina Curup dan PAUD Pertiwi Kabupaten Rejang Lebong)	Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi	Penelitian deskriptif Perbandingan

Sumber : modifikasi Penelitian, 2019

1. Made Febriantha Parisiawan (20113) berjudul Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Semarang Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Peran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan SLB di Semarang adalah sebagai pemangku kebijakan, melakukan pengkoordinasian, pembinaan sekaligus mengawasi serta menyusun program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum K-13, program yang disusun disesuaikan standar kompetensi sesuai dengan peraturan pemerintah untuk sekolah berkebutuhan khusus. Program yang direncanakan dan yang akan disampaikan harus mengandung 5 aspek yang harus disampaikan. Kelima aspek tersebut yaitu, 1) Permainan, 2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri keagamaan, 4) Aktivitas kebugaran jasmani, serta 5) kesehatan. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dikumpulkan data observasi, dokumentasi dan wawancara.

2. Andi Rifai (2017) berjudul implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Sulawesi Tengah. Hasil peneliti itu yaitu bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Karena itu peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peran yang penting untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Pelaksanaan kebijakan tersebut dalam bentuk

sosialisasi baik kepada pegawai dinas pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun kepada Masyarakat.

3. Andri Hadiansyah (2015) berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penelitian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil penelitian ini menemukan lembaga atau yayasan lain yang ikut serta dalam upaya ini, salah satunya Yayasan Asih Foundation (YAF). Lembaga ini sudah berhasil memberdayakan masyarakat dalam hal pendirian dan pembinaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia, termasuk di jabotabek. Akan mendeskripsikan tentang strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Yayasan Asih Foundation. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dengan subjek 3 sekolah di jabotabek. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Asih Foundation berada level meso. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dapat merasakan perubahan dan manfaat pembinaan yang diberikan oleh Yayasan Asih Foundation meski pembinaan yang utama hanya berlangsung selama 2 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini binaan ini dapat mengembangkan diri.
4. Suci Rahmadani (2018) berjudul Manajemen Peserta Didik pada Taman Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Do'a Ibu telah memenuhi standar dalam manajemen peserta didik yaitu: a) Perencanaan peserta didik dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik serta rasio

perbandingan antara guru dan anak. b) Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dicatat kedalam buku absensi. c) Pencatatan dan pelaporan peserta didik dilaksanakan dalam bentuk buku induk anak serta buku alumni. d) Pembinaan peserta didik dilakukan melalui beberapa layanan yakni layanan bimbingan dan konseling serta layanan kesehatan. e) Evaluasi peserta didik dilakukan melalui beberapa cara yakni observasi, wawancara, dan portofolio. f) Kelulusan dan alumni peserta didik dibuktikan dengan pemberian ijazah. g) Mutasi peserta didik ditandai dengan pemberian surat pindah. Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif

5. Suharti (2018) berjudul Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran (studi pada Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina curup dan Pendidikan Anak Usia Dini Pertiwi Kabupaten Rejang Lebong) hasil penelitian bertujuan menemukan perbandingan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pembina Curup dan Pendidikan Anak Usia Dini Pertiwi Kabupaten Rejang lebong dalam meningkatkan mutu pembelajaran dengan pendekatan deskriptif Kualitatif sehingga memperoleh simpulan sebagai berikut: manajemen Kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga Kependidikan, sarana dan prasaran manajemen keuangan Pendidikan Anak usia Dini sudah dilaksanakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan Pendidikan Anak Usia Dini Pertiwi, pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar, dengan cara memberi kesempatan pendidik untuk kuliah dan mengikuti diklat.

### C. Kerangka pemikiran

**Gambar II.I: kerangka pikiran Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi Dan desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019, menurut santoso (dalam Nurhazizah 2016)

### D. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikikiran dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan proposisi penelitian. Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan baik apabila adanya tahapan perencanaan, bimbingan, pengarahan dan pelatihan.

### E. Konsep Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari kesalahpahaman, penulis memberikn defenisi konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep dasar seagai berikut:

1. Pemerintahan adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
2. organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin pencapaian tujuan sebuah organisasi.
4. Pengertian pembinaan, Pembinaan pelaksanaan kegiatan kelompok bermain adalah keseluruhan proses kerjasama pembinaan terhadap pendidik dan pengelola, dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini karena pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawaban terhadap keberhasilan proses pembelajaran.

#### **F. Operasional variabel**

Operasional variabel penelitian ini yaitu Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangean Kabupaen Kuantan Singingi. Adapun konsep variabel berikut:

**Tabel II. 2 : Operasional variabel penelitian Tentang Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangean Kabupaen Kuantan Singingi**

Konsep	Varibel	Indikator	Sub Indikator
Pembinaan adalah usaha meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Atau Upaya menggerakkan bawahan yang dibina untuk mematuhi segala ajakan pengajaran dari peminanya sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Santoso (dalam Nurhazizah, 2016)	Peranan dinas pendidikan dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi Pada Desa Koto Tinggi Dan Desa Padang Tanggung	a. Perencanaan  b. Bimbingan  c. Pengarahan  d. Pelatihan	1) penyusunan menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang 2) kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu 1) Bantuan dan pertolongan yang diberikan untuk mengatasi dan menghindari kesulitan 2) Dilakukan untuk mengajak, menuntun, memotivasi. 1) Melakukan orientasi tentang tugas yang akan dilakukan 2) Melakukan petunjuk kedisiplinan kinerja 1) Kegiatan yang dilakukan untuk membekali lembaga melalui pendidikan pelatihan. 2) Dipandang sebagai salah satu waktu dalam meningkatkan kemampuan

Sumber: Olahan Peneliti 2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe penelitian**

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasikan, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun teknik yang digunakan metode kualitatif deskriptif bahwa menurut (Moleong 2014:11) bahwa deskriptif dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka, dengan demikian data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Creswell (1994:3) mendefenisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, masalah manusia, berdasarkan pada penciptanya gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil terhadap penelitian pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Desa Koto Tinggi Kec Pangean Kab.Kuantan Singingi dengan maksud peneliti

untuk mengetahui bagaimana kualitas sumber daya manusia pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Pangean Kab.Kuantan Singingi.

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam memilih lokasi penelitian ini, karena dilihat dari sekian banyak Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kabupaten Singingi, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangean yang bisa peneliti teliti, dilihat banyaknya guru sementara jumlah murid sedikit.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi. Informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti, (Sukandarumii, 2002: 65). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pada Desa Koto Tinggi Dan Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel III. 1: Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Eddi S.Pd	Kepala Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan
2	Nurhasanah	Kepala Sekolah Koto Tinggi
3	Rahadiati S.Pd	Kepala Sekolah Padang Tanggung
4	Wiwini Elsep Purwati	Guru Sekolah Kota Tinggi
5	Arnita S.Pd	Guru Sekolah Padang Tanggung
6	Fatmawi A.Md	Orang Tua Wali Murid Padang Tanggung
7	Mifta Febriani	Orang Tua Wali Murid Koto Tinggi

Sumber : Data lapangan,2019

#### **D. Teknik Penarikan Informasi**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposif sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai yang paling penting yang akan memudahkan peneliti mengetahui objek/situasi yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan yang dipilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### **E. Jenis Pengumpulan Data**

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan. Merupakan para Pegawai Dinas Pendidikan Bagian Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Luar Sekolah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pada Desa Koto Tinggi Dan Desa Padang Tanggung Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi.
2. Data sekunder yaitu: data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penilaian yang mendukung hasil penelitian ini. Data diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat didinas pendidikan pemuda dan olahraga dan dilembaga Pendidikan Anak Usia

Dini Pada Desa Koto Tinggi Dan Desa Padang Tanggung Kec.Pangean  
Kab.kuantan singingi

3. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Luar Sekolah Dan Lembag Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
4. Jumlah pegawai yang terlibat dalam setiap pembinaan.

#### **F. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu Dinas Pendidikan,serta para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
2. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap penelitian untuk melihat kenyataan
3. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, obsevasi, dan dokumentasi Di identifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian kemudian diperjelas dengan hasil,wawancara, observasi,

dokumentasi untuk dibandingkan dengan teori-teori yang berhuungan judul penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.

**Tabel III.II: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Dalm Pembinaan Lembaga Pendidikan Ana Usia Dini Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...																			
		januari				mei				Juli				Agustus				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■	■	■	■												
3	Revisi UP									■	■	■	■								
4	Revisi Kuissioner									■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survaiky									■	■	■	■								
6	Survey Lapangan									■	■	■	■								
7	Analisi Data													■	■	■	■				
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)													■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	■	■	■	■
10	Ujian Komferehensif Skripsi																				■
11	Revisi Skripsi																				■
12	Penggandaan Skripsi																				■

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau pekanbaru adalah 60 km.

Kabupateten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 provinsi, yaitu: provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 Kecamatan 11 Kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa. Dan yang sedikit adalah Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah (1.953,66 km<sup>2</sup>) kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97km<sup>2</sup>).

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit

dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Beni, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

**Tabel IV.I: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
1	Kuantan mudik	564,28	23.640	41,89
2	Hulu Kuantan	384,40	8.678	22,58
3	Gunung Toar	165,25	13.654	82,63
4	Pucuk Rantau	821,64	10.571	12,87
5	Singingi	1.9533,66	31.136	15,94
6	Singingi Hilir	1.530,97	37.594	24,56
7	Kuantan Tengah	270,74	47.323	174,79
8	Sentajo Raya	145,70	28.215	193,95
9	Beni	124,66	16.009	128,42
10	Kuantan Hilir	148,77	14.843	99,77
11	Pangean	145,32	18.462	127,04
12	Logas Tanah Darat	380,34	20.393	53,62
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	13.151	115,07
14	Cerenti	456,00	15.125	33,17
15	Inuman	450,01	15.482	34,40

Sumber : Kuantan Singingi 2019

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

Kecamatan Pangean adalah sebuah Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Pada awal era otonomi daerah Pangean merupakan sebuah Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir. Seiring perkembangan zaman dan perjalanan waktu Pangean menjadi Kecamatan yang dianggap Layak untuk menjadi sebuah Kecamatan yang berhak menyelenggaraan pemerintahnya sendiri. Kecamatan ini dikenal dengan tradisi pacu jalur batang kuantan yang telah menjadi even pada kalender pariwisata nasional.

Satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan Pangean adalah Silat Pangean, Silat Pangean merupakan sebuah seni belah diri yang lahir dan dipopulerkan secara turun-temurun oleh guru-guru besar Silat Pangen (yang bisa dikenal dengan Induak Barompek). Seni bela diri yang dikenal dengan gerakannya lembut dan gemulai namun menyimpan akibat yang mematikan, hal ini menjadikan Silat Pangean menjadi sebuah seni bela diri yang sangat diminati untuk dipelajari oleh pemuda-pemuda yang berasal dari Pangean itu sendiri.

Desa Koto Tinggi dan desa Padang Tanggung adalah desa yang berada diwilayah kecamatan Pangean. Desa Koto Tinggi ini desa yang tidak dapat dipisahkan dari kata Silat Pangean yang dilakukan setiap tahunya didesa Koto tinggi Pangean tersebut.

### 3. Gambaran Mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ( Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Padang Tanggung)

#### 1. Jumlah Sumberdaya Manusia

**Tabel IV.II: Data Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	Desa	Nama Lembaga	Jumlah Murid	Jumlah Tenaga Kependidikan
1	Padang Tanggung	Assaqinah	36	4
2	Pembatang	Lavender	25	4
3	Pulau Rengas	Ra askia	25	4
4	Pasar Baru	Bunga Tanjung	25	3
5	Pauangit	Abdilah	20	4
6	Pulau Tengah	Harapan Bunda	34	4
7	Padang Kunik	Matahari	25	3
8	Rawang Binjai	Nurul Hidayah	28	5
9	Koto Tinggi	Mutiara Bunda	19	3
10	Pulau Kumpai	Raflesia	38	4
11	Teluk pauh	Flamboyan	26	4
12	Sukaping	Pelangi	30	3
13	Penghijauan	Kasih Ibu	20	3
14	Tanah bekali	Ar rahman	30	3

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

#### 2. Sarana dan Prasarana

**Tabel IV.III: Data Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SeKabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	TK	KB	TPA	SPS
1	2	3	4	5	6
1	Kuantan Hilir Seberang	7	9	0	0
2	Sentajo Raya	16	7	0	1
3	Kuantan Tengah	26	21	2	0
4	Benai	10	14	0	0
5	Hulu Kuantan	12	9	0	0
6	Inuman	11	9	0	0
7	Cerenti	10	15	0	0

1	2	3	4	5	6
8	Logas Tanah Darat	13	5	0	3
9	Singingi Hilir	20	15	0	6
10	Kuantan Hilir	11	11	0	1
11	Kuantan Mudik	15	14	0	0
12	Singingi	13	9	0	1
13	Pangean	4	14	0	3
14	Gunung Toar	10	10	1	3
15	Pucuk Rantau	8	5	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

## **B. Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi**

### **a. Rencana Strategis**

Rencana Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan dalam mencapai suatu tujuan. Rencana strategis dinas pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksanaan pada jajaran dinas pendidikan.

## b. Visi dan misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi tersebut, sedangkan visi dalam pembangunan merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan.

Visi pembangunan dinas pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Mengacu pada pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Unggul, sejahterah, dan agamis di Provinsi Riau pada tahun 2021”**.

Bertitik tolak dari visi Kabupaten Kuantan Singingi tersebut diatas maka untuk mendukung upaya pencapaian visi yang dimaksud Dinas Pendidikan merumuskan visi sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Bersih, Efektif, Religius, Cepat, Aman, Harmonis, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera (BERCAHAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa misi Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Peningkatan upaya pencapaian pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi
3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/ usaha baru yang memanfaatkan Sumber Daya Manusia lokal/daerah.
4. meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan
5. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas merata
6. meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

Memperhatikan dan mengacu pada visi serta misi Kabupaten Kuantan Singingi di atas, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan, maka disusun visi Dinas Pendidikan sebagai berikut :**“Terwujudnya Pendidikan Bermutu Yang Merata Berlandaskan Iman dan Taqwa”**

Penjelasan defenisi visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Bermutu mengandung makna terciptanya kondisi input, proses dan ouput yang memiliki daya saing.
2. Merata mengandung makna seluruh kelompok sasaran mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.
3. Iman dan Taqwa mengandung arti bahwa seluruh kegiatan pendidikan didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

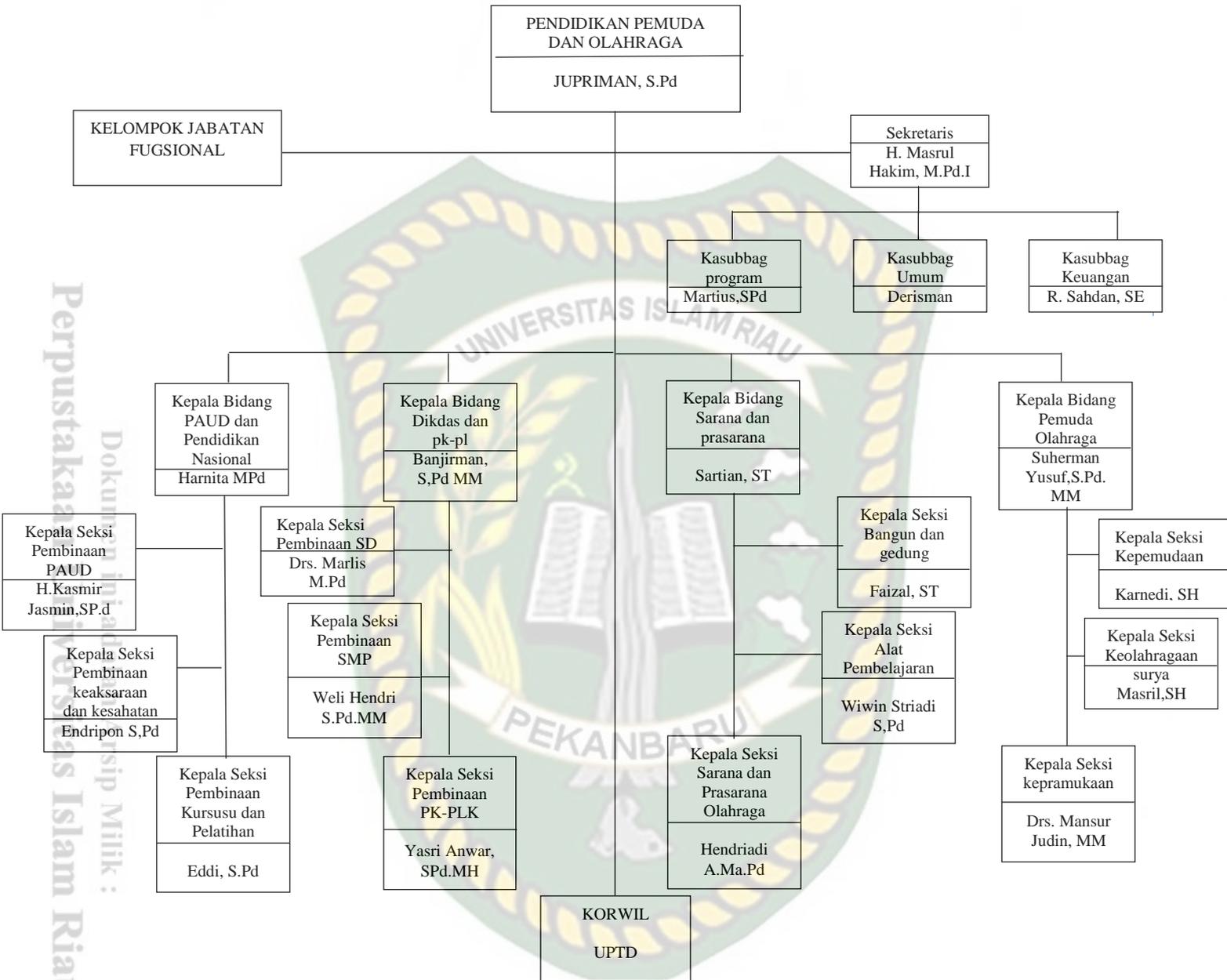
Dalam rangka mewujudkan dan menjabarkan visi tersebut diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi mengembangkan misi sebagai berikut :

**Tabel IV.IV:Rumusan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	MISI
1	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang meluas merata dan berkeadilan
2	Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu
3	Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalismependidik dan tenaga kependidikan
4	Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik
5	Meningkatkan eksistensi peran pemuda yang kreatif produktif, berprestasi dan bekarakter dalam bidang olahraga dan seni
6	Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi

### C. Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

## **D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas membantu Bupati Kuantan Singingi dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan serta penilaian atas pelaksanaannya. Didalam pasal 4 bagian dua susunan organisasi peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 45 tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja unit pelaksana teknis dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan bahwa sebagai berikut

### **1. Kepala UPTD**

Didalam pasal 5 kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut: memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga diwilayah kerja Kecamatan.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.

- b. Pengkoordinasian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.
- c. Perumusan kebijakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.
- e. Pembinaan kebijakan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.
- f. Pengawasan kebijakan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di wilayah kerja kecamatan,
- g. Pengendalian kebijakan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.
- h. Pengevaluasian dan pelaporan kebijakan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Uraian tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan;
- e. pembinaan kepegawaian;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana;
- g. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan perjalanan dinas;
- i. penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- j. penyelenggaraan keprotokoleran;
- k. pengelolaan keuangan;
- l. pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan

### **3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Paud dan Pendidikan Nonformal. Uraian tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Paud dan Pendidikan Nonformal membawahi:

a. Seksi Pembinaan Paud;

Kepala Seksi Pembinaan Paud mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Paud Kepala Seksi Pembinaan Paud dalam melaksanakan tugas:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan paud
2. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pembinaan paud;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan paud;
4. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan paud;
5. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pembinaan paud;
6. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pembinaan paud;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembinaan paud;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Pembinaan Kursus, dan Pelatihan;

c. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

**4. Bidang Dikdas dan PK-PLK membawahkan:**

- a. Seksi Pembinaan SD;
- b. Seksi Pembinaan SMP;

- c. Seksi Pembinaan PK-PLK.

**5. Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut:**

- a. Seksi Bangunan dan Gedung;
- b. Seksi Alat Pelajaran;
- c. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga.

**6. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:**

- a. Seksi Kepemudaan;
- b. Seksi Keolahragaan;
- c. Seksi Kepramukaan.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Peranan Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung). Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini diakibatkan karena banyaknya guru PAUD berjenis kelamin perempuan. Dalam penelitian ini 6 orang informan perempuan dan yang laki-laki hanya 1 orang.

## 2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informannya, mulai dari yang termuda yaitu: Wiwin Elsep Purwanti 23 tahun, Mifta Febriani 23 tahun, Harnita 24 tahun, fatmawati A.md 29 tahun, Radiati S.Pd 41 tahun, Eddy S.Pd 43 tahun, dan sampai yang paling tua Nurhasanah 45 tahun.

**Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Presentase
1	20-25	3	43%
	26-30	1	14%
	31-35	0	0
	36-45	3	43%
Jumlah		7 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 7 orang yang dijadikan informan sebanyak 3 orang atau 43% berumur antara 20-25 tahun, sebanyak 1 orang atau 14% berumur 26-30 tahun, sebanyak 3 orang atau 43% berumur 36-45 tahun.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Selain itu responden tersebut cukup berpengalaman dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

### 3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang jenjang terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 orang sampai dengan yang tertinggi Sarjanah (S1) 3 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan, masih kurangnya pemahaman guru yang berjenjang terakhir SMA didalam pendidikan atau dalam memahami pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Guru yang kurang mengerti akan tingkat kesadaran dalam membangun pendidikan Anak Usia Dini yang kompeten, bisa dilihat dari cara mereka menjelaskan dalam pemahamannya.

## **B. Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung)**

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan peranan dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam membina lembaga Pendidikan Anak usia Dini dikecamatan Pangean Kabupaten Singingi, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembinaan menurut santoso (dalam Nurhazizah 2016) dimana indikator-indikator tersebut adalah

1. Perencanaan
2. Bimbingan
3. Pengarahan
4. Pelatihan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 7 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul peneliti.

### **a. Perencanaan**

Menurut wahyuni (2013:13) Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan

yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sehingga kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Berdasarkan defenisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam menyusun strategi untuk mewujudkan sebuah tujuan akan dicapai dimasa yang akan datang, melalui interaksi dengan berbagai pihak dan diakhiri dengan sebuah evaluasi untuk melihat apakah sebuah penyusunan strategi tersebut sudah lakukan dengan baik ataukah belum.

Perencanaan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di desa Koto Tinggi dan Padang Tanggung Kecamatan Pangean.

Berdasarkan indikator perencanaan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Indikator dari perencanaan adalah sebagai berikut:

#### **a.1. Penyusunan Apa Yang Akan Dicapai Dimasa Yang Akan Datang**

Dalam perencanaan penyusunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Telah melakukan perencanaan penyusunan seperti penyusunan pengembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dimasa yang akan datang Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Eddi S.Pd, selaku Kepala Seksi Pembinaan kursus dan pelatihan. Berikut adalah petikannya yang menyatakan:

*Didalam sebuah perencanaan pembinaan kami dari Dinas memberikan pembinaan dalam bentuk Bimtek(bimbingan Teknis), sosialisasi PAUD, dan akreditasi. (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan perencanaan terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Seperti bimbingan teknis, sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Sejalan dengan pendapat kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung dan guru Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung yang juga mengatakan hal yang sama. Hasil wawancara dengan Rahadiati dan Arnita:

*Dinas memang telah melakukan sebuah perencanaan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sebuah bimbingan. (Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

*Perencanaan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga seperti akreditasi PAUD(Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Dari ungkapan diatas, bahwa telah ada perencanaan yang dilakukan oleh Dinas, dan perencanaan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah terlaksanan, akreditas dan bimbingan teknis.

Beda halnya dengan pendapat Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi dan guru Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi yang menyatakan tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Nurhasanah dan Wiwin Elsep Purwati beliau menyatakan bahwa:

*Dinas sendiri belum ada melakukan sebuah Perencanaan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi, dan adapun Perencanaan Lembaga, saya selaku Kepala Sekolah Koto Tinggi untuk mengembangkan Lembaga dalam segi dana, itu sedikit dana dari anggaran Desa dan penambahan dari kami masing-masing guru. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

*Perencanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kepada Pendidikan Anak usia Dina tidak ada. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

Berbeda halnya dengan ungkapan sebelumnya, bahwa tidak ada perencanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi, namun adapun perencanaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi untuk sebuah pengembangan Lembaga dalam segi dana, dana yang didapat hanya sedikit dari anggaran Desa dan penambahan masing-masing guru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara wali murid yang mengatakan:

*Saya kurang mengetahui perencanaan apa yang dilakukan oleh Dinas, lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia*

*Dini Padang Tanggung. ( Fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Padang Tanggung, 15 agustus 2019\_09:12 WIB)*

*Mengenai perencanaan Dinas Di Lembaga Anak Usia Dini saya tidak tahu pasti, karena saya hanya sebagai wali murid dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Dinas Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. (Mifta Febriani, wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi, 08 Juli 2019\_16:45 WIB).*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa wali murid tidak mengetahui secara pasti perencanaan apa yang dilakukan oleh Dinas di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa Dinas telah melakukan perencanaan yang berupa bimbingan teknologi, sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan meningkatkan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, namun masih adanya guru yang tidak mengetahui adanya perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, salah satunya guru Desa KotoTinggi mengukapkan tidak adanya perencanaan penyusunan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum secara optimal memberikan pembinaan dalam bentuk perencanaan unuk meningkatkan profesionalisme peserta pendidik dan memberikan pembaharuan terhadap lembaga.

#### **a.2. Kegiatan Untuk Mencapai Suatu Tujuan Tertentu**

bahwasanya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan sebuah kegiatan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui perencanaan pencapaian disini peneliti telah menemukan hasil dari wawancara dengan beberapa informan. Dimana hal ini disampaikan oleh Eddi yang mengatakan :

*perencanaan yang dilakukakn sepert memberikan Bimtek, Sosialisasi PAUD, akreditas PAUD. Dokumentasinya berbentuk SOP(Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

ungkapan diatas menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga seperti melakukan sebuah bimbingan teknis kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sementara dokumentasinya dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pernyataan diatas. Sejalan yang diungkapkan oleh Rahadiati S.Pd dan Arnita S.Pd yang mengatakan:

*Perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas seperti memberikan bimbingan teknis dan pembuatan kurikulum. (Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan perencanaan berupa akreditas. (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan sebuah peencanaan. Perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga seperti akreditas dan bimtek, berikut petikan wawancara dengan Nurhasanah dan Wiwin Elsep Purwati yang menyatakan:

*Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga belum ada melakukan sebuah perencanaan. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

*Selama saya mengajar disini tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi belum ada melakukan sebuah perencanaan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid yang mengatakan:

*Untuk perencanaan Dinas Pendidikan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung saya Kurang tahu. ( Fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Padang Tanggung, 15 agustus 2019\_09:12 WIB)*

*Saya tidak paham dengan perencanaan Dinas. (Mifta Febriani, wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi, 08 Juli 2019\_16:45 WIB).*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa wali murid tidak terlalu mengetahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Dari hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan Dinas terhadap Pendidikan Anak Usia Dini sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Seperti perencanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan program di dirikannya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam satu Desa satu Pendidikan Anak Usia Dini dan harus berakreditasi. Dari sebuah perencanaan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga sudah baik hanya saja guru Pendidikan Anak Usia Dini koto Tinggi kurang memahami perencanaan yang dibuat tersebut. Ini dibuktikan dari keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berada di Pendidikan Anak Usia Dini mayoritas kelulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas saja, tentunya memberikan dampak pada perencanaan dari guru Pendidikan Anak Usia Dini Koto Tinggi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat disimpulkan perencanaan terhadap Lembaga pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung mengenai penyusunan perencanaan dan kegiatan perencanaan dapat dibuktikan cukup baik. Hanya saja terdapat beberapa guru yang kurang memahami perencanaan yang dibuat Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ini menjadi sebuah hambatan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga telah memenuhi indikator ini yang didukung oleh adanya standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga didalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pemangunan daerah.



Gambar 1 : Dinas memerikan perencanaan berebentuk sosialisasi PAUD dan BIMTEK

Gambar diatas membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi PAUD sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Dinas itu sendiri melalui wawacara dengan peneliti.

### **b. Bimbingan**

Bimbingan itu sendiri adalah bantuan pertolongan yang diberikan untuk mengatasi dan menghindari kesulitan yang dilakukan untuk mengajak, menuntun dan memotivasi.

Menurut Chiskolm (dalam Prayitno dan Amti 2004:93) Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu kemajuan. Bimbingan membantu individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan, dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistematis melalui mahasiswa dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap sekolah dan terhadap kehidupan.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu layanan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka membantu Lembaga Pendidikan dalam mengembangkan segala kegiatan sesuai dengan rencana. Berdasarkan teori bimbingan diatas terdapat beberapa indikator yang dipaparkan dibawah ini :

#### **b.1. Bantuan dan Pertolongan Yang Diberikan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan indikator Bimbingan diatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bahwa telah melakukan bimbingan keseluruhan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yaitu Eddi S.Pd, selaku Kepala Seksi Pembinaan PK-PLK menyampaikan :

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selalu melakukan bimbingan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

Dari ungkapan diatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini. Dan didukung dengan penyampaian Rahadiati dan

Arnita :

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selalu ada memberikan bimbingan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. apalagi Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang memang sedikit tertinggal atau yang baru berkembang, ini bisa berbentuk Pelatihan dan berbentuk seminar ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

*Dinas Pernah memberikan bimbingan, dimana bimbingan dilakukannya secara diklat atau pelatihan. (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Sama halnya dengan jawaban sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga telah melakukan bimbingan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, apalagi kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang sedikit tertinggal atau yang baru berkembang. Hal ini dilakukan secara diklat atau pelatihan. Berbeda dengan ungkapan diatas, seperti yang disampaikan Nurhasanah dan Wiwin Elsep Purwati

*Memang Dinas Pendidikan memberikan bimbingan keseluruh Lembaga, namun Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi bisa dikatakan hanya beberapa kali mengikuti bimbingan yang diberikan yang berupa diklat atau pelatihan, ini dikarenakan faktor dana dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi kurang mencukupi. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

*Bimbingan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk saya pribadi selaku guru Pendidikan Anak Usia Dini mengikutinya hanya satu kali. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

Sedikit berbeda dengan ungkapan sebelumnya, bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memang memberikan pembinaan yang berbentuk bimbingan secara keseluruhan kepada setiap Lembaga Pendidikan Anak Usia

Dini namun tidak semua lembaga yang mengikuti bimbingan tersebut dikarenakan faktor Keuangan atau faktor dana untuk mengikuti diklat tersebut. Sedang sepengetahuan wali murid Fatmawati A.Md dan Mifta Febriani menyampaikan :

*Saya sendiri tidak terlalu mengetahui bimbingan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, akan tetapi alasan saya sebagai wali murid untuk menitipkan anak saya di Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung ini menurut saya mutu guru Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sangat bagus selain itu Kepala sekolah Padang Tanggung adalah ketua dari semua PAUD yang ada di kecamatan Pangean. (fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung 15 agustus 2019\_09 : 12 WIB)*

*Selaku wali murid saya tidak pernah melihat seperti guru Koto Tinggi mengikuti bimbingan, ditanya soal mutu, sebagai wali murid anak perlu bermain dengan teman sebaya, untuk itu saya tidak terlalu melihat mutu guru karena setiap guru yang ditunjuk dari Desa kami itu mereka melakukan kewajiban dengan mengajari anak-anak memperkenalkan cara belajar dengan bagus. ( Mifta Febriani wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_16 : 45 WIB)*

Ungkapan diatas bahwa, sebagai wali murid mereka tidak terlalu mengetahui bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga namun dilihar dari pernyataan Fatmawati beliau mengatakan baha mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Padang Tanggung sangat bagus untuk itu dia tertarik untuk menitipkan anaknya di Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa bimbingan yang dilakukan terhadap lembaga pendidikan Anak Usia Dini yang berupa sebuah pelatihan ini belum berjalan dengan optimal. Masih ada terdapat guru yang tidak melakukan bimbingan, dikarenakan faktor dana yang tidak memadai. Salah satunya guru Pendidikan Anak Usia Dini Koto Tinggi. Hal ini berdampak bahwa pembinaan yg berbentuk bimbingan untuk meningkatkan profesionalisme peserta pendidik dan untuk memberikan pembaharuan kepada lembaga tidak berjalan

dengan baik. Karenanya wali murid lebih cenderung memilih Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Padang Tanggung.

## **b.2. Untuk Mengajak, Menuntun, Memotivasi**

Untuk mengajak, menuntun, dan memotivasi maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memeberikan sebuah kegiatan dalam bentuk bimbingan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengadakan diklat atau sebuah pelatihan. Bahwasanya untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) memerlukan SDM yang memadai dan mempunyai pengetahuan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang didasarkan pada indikator mengajak, menuntun dan memotivasi. Berikut adalah petikan wawancara dengan Eddi S.Pd, selaku Kepala Seksi Pembinaan PK-PLK mengatakan :

*Bimbingan tersebut seperti sebuah Pelatihan atau diklat sifatnya ada monitoring kelembaga langsung atau survei. Dan dengan adanya bimbingan seperti ini, ini sangat mampu meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menganalisa bahwa bimbingan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi Desa Padang Tanggung sudah melakukan bimbingan. Bimbingan tersebut seperti pelatihan atau diklat dan sifatnya monitoring kelembagaan langsung dan survei. ini sangat mampu meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Rahadiati yang mengatakan :

*Dengan adanya bimbingan ini hanya sebagian yang mampu meningkatkan mutu, karena faktor pendukung dari segi dana, dimana untuk mengikuti sebuah pelatihan dana ditanggung masing-masing Lembaga, dan sebagian Lembaga tidak terlalu memberatkan untuk mengikuti bimbingan yang diberikan. ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

*Dinas Pernah memberikan bimbingan, dimana bimbingan dilakukannya secara diklat atau pelatihan, atau bimbingan diarahkan seperti penyampaian didepan seperti informasi dengan cara seminar. Untuk Lembaga kami bimbingan yang diberikan mampu meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan bimbingan masih belum optimal karena bimbingan yang diberikan belum mampu meningkatkan mutu semua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dimana bagi Pendidikan Anak Usia Dini yang belum berkembang tidak menganggap begitu penting Pendidikan anak Usia Dini, selain itu faktor keuangan, sehingga tidak meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini didukung oleh pernyataan Nurhasanah dan dan Wiwin Elsep Purwati menyatakan:

*Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan seperti diklat. Untuk diklat kami jarang mengikuti karena faktor dana. Dari hal itu bagi kami sudah kurang mampu meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

*Bimbingan seperti pelatihan. Masih belum mampu meningkatkan mutu. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB).*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat bahwa bimbingan yang dilakukan yang berupa pelatihan atau diklat belum mampu meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid yang mengatakan:

*Masalah mutu bisa saya katakan mampu meningkat mutu Pendidikan anak Usia Dini Desa Padang tanggung. (fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung 15 agustus 2019\_09 : 12 WIB)*

*Mampu meningkatkan mutu anak saya. (Mifta Febriani wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_16 : 45 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat bahwa wali murid dengan menitipkan anak-anak mereka ke Pendidikan Anak usia Dini sudah menganggap mampu meningkatkan mutu anak-anak mereka.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa Dinas Pendidikan dalam memberikan pembinaan yang berbentuk bimbingan yang berupa pelatihan masih menilai kurang. Karena tidak semua guru mengikuti pelatihan dari faktor dana, ini bisa dikatakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kurang memahami dalam segi dana. Karenanya tidak mampu meningkatkan pembaharuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan meningkatkan mutu pendidik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dan Observasi yang dilihat maka peneliti berpendapat bahwa Dinas dalam membimbing sudah baik, hanya saja perlu dimaksimalkan, karena masih terdapat Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak mampu meningkatkan pembaharuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Ini dibuktikan dari hasil keseluruhan jawaban informan, bahwa Dinas sudah melakukan bimbingan, namun berdasarkan observasi peneliti masih menilai kurang, dikarenakan dari beberapa pendapat guru Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa hanya sebagian yang mampu meningkatkan mutu peserta pendidik

Pendidikan Anak Usia Dini dan pembaruan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini meskipun telah diadakan bimbingan seperti pelatihan dan seminar, menurut peneliti Dinas tersebut tidak terlalu menekankan kepada keseluruhan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, karenanya masih ada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berpendapat bahwa Pendidikan Anak Usia Dini masih belum penting. Maka dari itu peneliti menilai bahwa pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan profesionalisme pendidik masih dinilai belum terlaksana secara optimal.

Sementara itu fakta yang ada diatas belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur permendiknas nomor 41 tahun 2009 tentang standar pembimbing pada kursus dan pelatihan, yang mana dijelaskan bahwa memahami karakteristik dan kebutuhan warga belajar dalam menyelenggarakan program bimbingan. Sementara Dinas hanya mampu menyelenggarakan program saja namun belum mampu memahami karakteristik warga belajar yang ada di Pendidikan Anak Usia Dini beserta kebutuhannya, seperti dalam hal Pendanaan.



Gambar 2 : bimbingan yang berbentuk pelatihan

Gambar diatas bisa dilihat bahwa Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga telah melakukan sebuah bimbingan yang berbentuk pelatihan. Sesuai dengan yang diungkapkan pak Eddi Spd selaku kepala Seksi pembinaan kursus dan pelatihan.

### c. Pengarahan

Pengarahan itu sendiri adalah melakukan orientasi itu sendiri tentang tugas yang akan dilakukan atau melakukan petunjuk umum dan khusus.

Menurut mortimer (1996:9) Pengarahan bisa dilakukan oleh para pemimpin bisa secara individu maupun secara kelompok. Organisasi yang tahu manfaat pengarahan ini selalu melakukan secara rutin dengan maksud menjalin komunikasi secara vertical maupun horizontal, sehingga dapat mendiskusikan

pemecahan masalah secara efektif. Pengarahan yang efektif akan meningkatkan dukungan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas dalam pengertian Pengarahan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengarahan itu sendiri adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisiensi. Pada indikator ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada setiap informan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam indikator ini, Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan arahannya.

#### **c.1. Melakukan Orientasi Tentang Tugas Yang Akan Dilakukan**

Memberikan sebuah arahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga sebagaimana untuk tugas yang akan dilakukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahwasanya pengarahan sangat dibutuhkan bagi kepala sekolah dan guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD) agar benar-benar betul dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendidik anak usia dini (PAUD). Untuk mengetahui ada atau tidak pengarahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga maka peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara.

Berikut hasil penelitian dengan Informan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didasarkan pada indikator pengarahan. Berikut adalah petikan dengan Rahadiati yang mengatakan:

*Dengan melalui ketua IGPK dipanggil oleh kabupaten bagi lembaga sekolah kami ada yang berkurang perkembangannya tolong ditingkatkan melalui ketua yang mana dinas itu langsung turun, namun tidak tercapai*

*secara keseluruhan. ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan arahan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung dengan melalui ketua IGPK dipanggil oleh Dinas, dimana jika ada yang kurang perkembangannya maka Dinas meminta untuk meningkatkan lagi. Dinas langsung turun tapi tidak mencapai keseluruhan Lembaga, Dinas bisa memberikan arahan melewati ketua IGPK tersebut. Ini didukung oleh ungkapan Eddi yang menyampaikan :

*Arahan yang kami berikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan cara mengawasi data Lembaga dan melihat kondisi fisik atau insprastruktur, terkadang kami memberikan informasi arahan melewati media sosial yang ada. (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_10 : 00 WIB)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa arahan telah dilaksanakan dgn cara mengawasi data lembaga dan telah diberikan suatu arahan melewati media whatsapp dan dapat dikatakan bahwa telah terlaksananya suatu pengarahan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga. Berbeda pendapat dengan Nurhasanah yang berpendapat bahwa:

*Dinas pendidikan pemuda dan olahraga sebetulnya memberikan arahan seperti pelatihan, namun pengarahan ini kami selaku kepala sekolah pendidikan anak usia dini (paud) desa koto tinggi jarang mengikuti pelatihan ini, dilihat dari pengawasan Dinas sendiri, dinas jarang sekali melakukan pengawasan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dinas pendidikan pemuda dan olahraga sebetulnya memberikan arahan seperti pelatihan, namun informasi yang diketahui dari kepala sekolah Koto Tinggi Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga jarang sekali melakukan pengawasan di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) desa koto tinggi. Dan dapat dikatakan bahwa pengarahan yang diberikan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga belum terlaksana dengan baik.

Berikut ini ungkapan dari Arnita yang menyatakan:

*Arahan yang diberikan seperti mengawasi lembaga jika masih ada kekurangan. (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan memberikan arahan dengan cara mengawasi lembaga jika terdapat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang masih terdapat kekurangan. Berbeda yang diungkapkan oleh Wiwin Elsep Purwati yang menyatakan:

*Tidak ada arahan yang diberikan oleh dinas kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB).*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa guru Koto Tinggi tidak ada di berikan arahan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya berdasakan hasil wawancara wali murid yang menyatakan:

*Sama halnya dengan perencanaan, bimbingan saya kurang mengetahui. (fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung 15 agustus 2019\_09 : 12 WIB)*

*Tidak mengetahui hal itu. (Mifta Febriani wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_ 16 : 45 WIB)*

Ungkapan diatas bahwa wali murid tidak mengetahui pengarahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung sudah cukup baik, namun terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto tinggi belum optimal. Ini bisa dilihat pernyataan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi pengarahan yang berbentuk mengawasi tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi hal ini berdampak bahwa pembinaan yang berbentuk pengarahan yang berupa pengawasan untuk meningkatkan pembaharuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini belum berjalan dengan optimal.

### **c.2. Melakukan Petunjuk Kedisiplinan Kinerja**

dalam sebuah lembaga atau organisasi mempunyai suatu aturan agar lembaga atau organisasi tersebut dapat berjalan dengan tertib dan disiplin, dengan itu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga melakukan petunjuk Kedisiplinan Kinerja kepada lembaga pendidikan anak usia dini agar mereka mengetahui aturan-aturan dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui adanya petunjuk umum dan khusus maka peneliti melakukan sebuah penelitian dengan mewawancarai beberapa informan yang mengetahui akan hal ini. Eddi menyatakan:

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan sanksi, sanksi yang diberikan seperti bantuan tidak akan diusulkan dari Dinas itu bentuk insprasional, kemudian diklat tidak kami ikutkan, setelah itu, jika dia sartivikasi dan tidak akan diusulkan oleh dinas tunjangan profesi. (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

Dari ungkapan diatas bahwasanya tingkat kedisiplinan kinerja sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sanksi yang diberikan seperti, jika ada bantuan maka dinas tidak memberikan bantuan tersebut yang berbentuk insprasional, dan kemudian jika kinerja melanggar aturan maka diklat juga tidak akan diikukan setelah itu jika sudah sertifikasi dinas tidak akan memberikan tunjangan. Sejalan dengan pernyataan Wiwin Elsep Purwati :

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memeberikan sanksi kepada lemaga yang tidak mengikuti peraturan, sanksi yang diberikan yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bisa saja ditiutup. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan sanksi jika ada yang melanggar kinerja. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa penutupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini itu sendiri. Beda halnya dengan pendapat Rahadiati dan Nurhasanah :

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal sanksi untuk terlalu formal sekali tidak ada sanksi, namun dalam hal sanksi kebersamaan untuk saat ini masalah insentif banyak lembaga yang tidak mempunyai izin Operasional sehingga nilai nilai Lembaga kurang bagus. ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak ada memberikan sanksi kepada lembaga kami Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

Dari pernyataan diatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak ada sanksi yang dilakukan secara formal, namun dalam hal sanksi kebersamaan untuk saat ini masalah insentif banyak lembaga yang tidak mempunyai izin. Hal ini juga didukung dengan pernyataan arnita yang menyatakan:

*Tidak ada sanksi yang formal. (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat tidak adanya sanksi formal yang diberlakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara wali murid yang mengatakan:

*Sepertinya tidak ada sanksi. (fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung 15 agustus 2019\_09 : 12 WIB)*

*Tidak mengetahui sanksi. (Mifta Febriani wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_ 16 : 45 WIB)*

Berdasarkan hasil obsevasi yang peneliti lakukan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak mengikuti peraturan belum berjalan dengan optimal. Karena tidak ada sanksi terlalu formal kepada lembaga yang tidak mengikuti aturan, maka dari itu peneliti beranggapan bahwa pembinaan yang diberikan berbentuk pengarahan belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti berpendapat bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah memberikan pengarahan dan sanksi sudah baik, dibuktikan dari hasil wawancara bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan survei langsung memberikan arahan seperti seminar kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, namun menurut observasi peneliti,

sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga masih belum optimal dan belum terlaksana, dilihat dari pernyataan beberapa guru Pendidikan Anak Usia Dini tidak ada sanksi yang dilakukan oleh Dinas dan salah satu dari guru yang memberikan pernyataan, untuk sanksi terlalu formal tidak ada. Hal ini dikatakan bahwa dinas dalam melakukan sebuah pembinaan dalam bentuk pengarahan yang berupa mengawasi dan memberikan sanksi ini belum berjalan dengan optimal. Sehingga tidak meningkatkan profesionalisme peserta pendidik dan meningkatkan pembaharuan terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Sebagaimana fakta diatas Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum sesuai dengan Standar operasional Prosedur Dinas pendidikan Pemuda Olahraga Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pasal 6 huruf e yang menyatakan bahwa pemberian izin Pendidikan serta pencabutan izin satuan Pendidikan dasar, satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan nonformal, dimana masih ada lembaga yang belum mempunyai izin operasional. Dikuatkan lagi dengan pasal 6 huruf s yang berbunyi tentang pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, sementara Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga tidak secara keseluruhan mengawasi Lembaga Pendidikan anak Usia Dini, karenanya nilai Lembaga kurang bagus. Dapat peneliti simpulkan bahwa peranan dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga masih lemah dalam sebuah pengarahan.



Gambar 3 : Dinas memberikan pengarah berbentuk pengawasan

Gambaran di atas membuktikan bahwa Dinas telah melakukan pengarah dengan cara mengawasi.

#### 4. Pelatihan

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “*training*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah arti kata “*training*” adalah “*train*” yang berarti : (1) memberi pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*), (2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki (*cause to grow in a required direction*), (3) persiapan (*preparation*), dan (4) praktik (*practice*).

Menurut Jucius (dalam Kamil Mustofa 2012:3) mengemukakan pelatihan adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan

tertentu. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan.

Menurut Peters (dalam Kamil Mustofa 2012:4) istilah pelatihan bisa dihubungkan dengan pendidikan. Ini terutama karena secara konseptual pelatihan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Meskipun demikian secara khusus pelatihan dapat dibedakan dari pendidikan.

Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk membekali lembaga melalui pendidikan pelatihan dan dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan.

#### **d.1. Membekali Lembaga Melalui Pendidikan Pelatihan**

Kualitas sekolah ditentukan oleh kualitas gurunya, hal ini diperlukan sebuah pelatihan-pelatihan agar tenaga pendidikan seperti guru memiliki kemampuan-kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui sebuah pelatihan agar tenaga pendidik lembaga anak usia dini memahami atas tugasnya. Untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan, maka peneliti telah melakukan wawancara dari beberapa informan mengenai pelatihan lembaga pendidikan, berikut wawancara yang disampaikan Eddi yang mengatakan:

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selalu melakukan sebuah pelatihan kepada masing-masing Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, seperti diklat, diklat tersebut ada tiga, yang pertama diklat dasar, kedua diklat lanjut ketiga diklat mahir. (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyatakan Dinas selalu melakukan pelatihan

terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini seperti diklat. Diklat yang Dinas berikan ada 3 yang harus diikuti Lembaga. Yang pertama diklat dasar, yaitu pelatihan khusus yang dilakukan untuk guru yang berjenjang terakhir Sekolah Menengah Atas atau yang tidak berjenjang terakhir Pendidikan Anak Usia Dini. Kedua diklat lanjut, yaitu diklat setelah guru-guru tersebut telah lulus mengikuti diklat dasar. Ketiga diklat mahir yaitu guru- guru yang sudah bisa dianggap menjadi seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini. ini didukung oleh ungkapan Rahadiati dan Nurhasanah :

*Ya ada, dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga telah melakukan bimbingan dan pelatihan. ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB*

*Ada dilakukan, seperti diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

Jawaban yang sama dilontarkan oleh Kepala Sekolah Padang tanggung, kepala Sekolah Koto Tinggi, bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selalu melakukan pelatihan seperti diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. Hal ini juga didukung oleh ungkapan arnita dan Wiwin Elsep Purwati yang menyatakan:

*Ada melakukan pelatihan, seperti diklat. Diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

*Ada pelatihan yang dilakukan. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan pelatihan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Selanjutnya peneliti mewawancarai wali murid yang mengatakan:

*sepengetahuan saya guru-guru Pendidikan Anak usia Dini pernah mengadakan acara di salah satu gedung Serba Guna Kecamatan Pangean. Namun saya tidak mengetahui apakah itu sebuah bimbingan pelatihan atau semacamnya. (fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung 15 agustus 2019\_09 : 12 WIB)*

*mungkin ada seperti pertemuan pelatihan ada.( Mifta Febriani wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_ 16 : 45 WIB)*

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa guru pendidikan Anak Usia Dini telah mengadakan sebuah pelatihan. Namun, wali murid tidak terlalu mengetahui pelatihan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pelatihan yang dilakukan sudah baik terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung. Beda halnya dengan Desa Koto Tinggi peranan Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan yang berupa pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme peserta pendidik dan meningkatkan pembaharuan terhadap lembaga belum berjalan dengan baik. Karena gurru Koto Tinggi tidak mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dikarenakan faktor dana yang tidak mencukupi.

#### **d.2. Waktu Dalam Meningkatkan Kemampuan**

Dalam menjalankan sebuah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengetahui pedoman dan petunjuk dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan juga diperlukan waktu, karena dalam menjalankan pelatihan tidak bisa hanya sekali saja, diperlukan pelatihan secara teru-menerus demi terciptanya tenaga pendidik

yang memadai. Untuk mengetahui rutin atau tidaknya pelatihan yang diberikan oleh dinas pemuda dan olahraga peneliti telah mewawancarai beberapa informan mengenai waktu dalam meningkatkan kemampuan, berikut wawancara dengan Eddi yang mengatakan:

*Diklat kita lakukan dalam satu tahun tiga kali pelatihan. (Eddi S.Pd, kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan 3 Juli 2019\_ 10 : 00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pelatihan yang dilakukan sudah dikatakan rutin. Ini dilihat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pelatihan tiga kali dalam satu tahun. Selanjutnya ungkapan yang disampaikan Rahadiati dan Arnita yang mengatakan:

*Tidak tertentu, bisa dilakukan 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali atau ada program dari provinsi untuk kabupaten dan program kabupaten kepada kecamatan, maka dari itu tidak tertentu dilakukan sebuah pelatihan.(Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

*Pelatihan yang kami lakukan satu kali persemester. (Arnita S.Pd guru Pendidikan Anak Usia Dini Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 juli 2019\_15:00 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pelatihan memang sudah dilakukan, contohnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali dan juga pelatihan tersebut dapat dikatakan belum menentu waktunya. Hal ini dapat dikatakan bahwa waktu kegiatan pelatihan belum dikatakan sempurna. Berbeda dengan pendapat Wiwin Elsep Purwati dan Nurhasanah yang mengatakan:

*Pelatihan dilakukan satu tahun sekali, itupun kami bisa tidak mengikutinya. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

*Sangat jarang kami melakukan pelatihan karena faktor dana yang kurang memadai. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

Berdasar ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum optimal melakukan pelatihan ini dilihat bahwa Wiwin Elsep Purwati selaku guru Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi juga tidak mengikuti pelatihan yang diadakan satu kali dalam satu tahun.

Selanjutnya hasil wawancara dengan wali murid yang menyatakan:

*Pelatihan mungkin ada. (fatmawati A.Md wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung 15 agustus 2019\_09 : 12 WIB)*

*Kurang tau saya. ( Mifta Febriani wali murid Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_16 : 45 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat bahwa wali murid sekedar melihat sekilas tidak untuk memahami.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan belum optimal masih ada guru yang tidak mengikuti diklat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini terlihat dari ungkapan guru Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi bahwa mereka selaku guru belum mengikuti diklat. Dikalta yang diberikan ini untuk meningkatkan profesionalisme peserta pendidik, maka dari itu, hal ini dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan belum berjalan dengan optimal

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti berpendapat bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas yang berupa pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme peserta pendidik masih kurang baik, tidak semua guru mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas sebagaimana dilihat dari masih ada guru yang mengikuti pelatihan sekali dalam setahun, sementara Dinas mengadakan pelatihan 3 kali dalam satu tahun, sehingga pelatihan yang dilakukan belum dilakukan secara optimal. Sehingga tujuan dari pembinaan belum berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut Standar Operasional Prosedur Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga Permendiknas 42 tahun 2009 tentang standar pengelola pada Kursus dan Pelatihan yang tercantum dalam isinya bahwa pengelola kursus dan pelatihan sangat penting dalam memelihara keberlangsungan kegiatan pembelajaran pada lembaga kursus dan pelatihan akan tetapi Dinas masih lemah dalam memberikan pelatihan terhadap Lembaga, sehingga Lembaga sebagian masih tidak berkembang.



Gambar 4 : pelatihan yang diberikan oleh dinas yang diikuti oleh guru-guru

Gambar diatas membuktikan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga telah melakukan sebuah pelatihan ini diungkapkan oleh Eddi selaku seksi pembinaan kursus dan pelatihan.

### **C. Hambatan-Hambatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang tanggung)**

Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung belum optimal dengan baik karena disebabkan beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepala Sekolah Desa Koto Tinggi yang menyatakan:

*perencanaan yang dilakukakn seperti mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, kami mewajibkan dalam satu Desa harus ada satu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Namun Lembaga yang didirikan didalam sebuah Desa tersebut harus mempunyai surat izin dan berakredetasi, Dan perencanaan ini sudah terlaksana. Dan dokumen-dokumentasinya kami tuangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. (Eddi S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrraga Bagian Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi 3 Juli 2019\_10 : 00 WIB)*

*Dinas sendiri belum ada melakukan sebuah Perencanaan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi, dan adapun Perencanaan Lembaga, saya selaku Kepala Sekolah Koto Tinggi untuk mengembangkan Lembaga dalam segi dana, itu sedikit dana dari anggaran Desa dan penambahan dari kami masing-masing guru. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan sebuah perencanaan terhadap lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini. Peencanaan yang dibuat seperti dalam satu Desa diwajibkan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan perencanaan itu sendiri sudah terlaksana. Namun kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi menyatakan belum adanya perencanaan yang dilakukan dari Dinas. Hal ini bisa dikatakan bahwa kurang pemahannya kepala sekolah terhadap perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, ini menjadi faktor penghambat Dinas dalam Rendahnya Sumber daya manusia yang dimiliki kepala sekolah Desa Koto Tinggi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Padang Tanggung yang menyatakan:

*Dengan adanya bimbingan ini hanya sebagian yang mampu meningkatkan mutu, karena faktor pendukung dari segi dana, dimana untuk mengikuti sebuah pelatihan dana ditanggung masing-masing Lembaga, dan sebagian Lembaga tidak terlalu memberatkan untuk mengikuti bimbingan yang diberikan. ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

berdasarkan ungkapan diatas bahwa bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa pelatihan. Dan pelatihan tersebut ditanggung dana oleh masing-masing Lembaga. Karenanya tidak semua Lembaga mengikutinya. Hal ini menjadi faktor penghambat dan tidak mampu meningkatkan mutu Lembaga dikarenakan faktor dari segi dana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepala Sekolah Desa Padang Tanggung yang menyatakan:

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan sanksi, sanksi yang diberikan seperti bantuan tidak akan diusulkan dari Dinas itu bentuk insprasional, kemudian diklat tidak kami ikutkan, setelah itu, jika dia sartivikasi dan tidak akan diusulkan oleh dinas tunjangan*

*profesi.(Eddi S.Pd Kepala Dinas Pendidikan bagian Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi 3 Juli 2019\_10 : 00 WIB)*

*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal sanksi untuk terlalu formal sekali tidak ada sanksi, namun dalam hal sanksi kebersamaan untuk saat ini masalah insentif banyak lembaga yang tidak mempunyai izin Operasional sehingga nilai nilai Lembaga kurang bagus. ( Rahadiati S.Pd Kepala Sekolah Padang Tanggung Kecamatan Pangean 6 Juli 2019\_10 : 10 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga masih kurang baik dalam memberikan sanksi. Kurang menekankan peraturan yang dibuat. Ini dilihat dari pernyataan kepala sekolah Desa Padang Tanggung tidak adanya sanksi terlalu formal.

Berdasarkan observasi peneliti bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak terlalu mengawasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa padang Tanggung dan Desa Koto Tinggi. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung yang menyatakan.

*Pelatihan dilkukan satu tahun sekali, itupun kami bisa tidak mengikutinya. (Wiwin Elsep purwati guru pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_10.20 WIB)*

*Sangat jarang kami melakukan pelatihan karena faktor dana yang kurang memadai. (Nurhasanah Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi 8 Juli 2019\_09 : 10 WIB)*

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masih lemah dalam dalam pelatihan karena masih ada guru yang tidak mengikuti pelatihan. Ini juga dikarenakan faktor dana.

Berdasarkan observasi peneliti, maka peneliti berpendapat Dinas Pendidikan kurang memahami kekurangan lembaga, sehingga lembaga tidak

dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebut.

1. Masih lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi Kecamatan Pangean, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi menyatakan bahwa pihak Pendidikan Anak Usia Dini tidak ada melakukan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Semantara itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah memberikan sebuah perencanaan.
2. Masih kurangnya dana, dimana didalam perencanaan dibuat program yaitu dalam satu Desa didirikan Satu Pendidikan Anak Usia Dini dan disetiap Pendidikan Anak Usia Dini tersebut harus berakreditasi, sementara itu untuk Pendidikan Anak Usia Dini di Desa koto Tinggi belum berakreditasi. Dari pihak Pemerintah Desa Koto Tinggi juga kurang membantu dalam pendanaan, ini dilihat dari dana yang diberikan keseluruhan tidak diperuntukan untuk akreditasi saja, tetapi juga untuk gaji guru yang ditunjuk oleh pemerintah Desa untuk menjadi guru Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi tersebut, sementara untuk menjadi guru Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki jenjang terakhir S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau mengikuti diklat. Tetapi guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Koto Tinggi tidak berjenjang terakhir S1, karena pemerintah Koto Tinggi menunjuk guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini bersal dari Desanya, ini

dikarenakan pemerintah Desa Koto Tinggi dana anggaran Desa yang dikeluarkan tersebut agar jatuhnya pada orang-orang Desanya, sementara di Desa Koto tinggi tidak ada yang berjenjang terakhir S1 PAUD dan tidak mengikuti diklat. Dengan tidak mengikuti diklat ini dikarenakan dana pemerintah yang tidak cukup untuk mengikuti diklat-diklat yang di adakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sehingga kurangnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Koto Tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Desa koto Tinggi lebih cenderung memilih Pendidikan Anak Usia Dini di Desa padang Tanggung.

3. kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Ini dilihat dari hasil wawancara dengan kepala sekolah Padang Tanggung yang menyatakan bahwa Dinas melakukan pengawasan tapi tidak secara keseluruhan. Selain itu sanksi yang diberikan oleh Dinas pemuda dan Olahraga belum terlaksana secara optimal.
4. Lemahnya dalam sebuah Pelatihan, ini bisa dilihat Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga masih tidak keseluruhan Lembaga yang mengikutinya, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini mengikuti satu kali dalam satu tahun sementara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukannya tiga kali dalam satu tahun. Dan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga terbatas ini dibuktikan dari Dinas tersebut melakukan tiga kali dalam satu tahun. Pelatihan ini juga lemah diakibatkan dana yang tidak memadai setiap lembaga, karena pelatihan yang

diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditanggung oleh lembaga yang mengikuti pelatihan. Itu sebabnya masih ada lembaga yang tidak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga. Jadi pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga masih belum optimal.

Secara keseluruhan hambatan-hambatan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini secara dominan adalah Pendanaan atau pembiayaan. Dimana dalam sebuah perencanaan, bimbingan, pengarahan dan pelatihan lembaga harus memiliki dana. Ini dilihat dari sebuah perencanaan harus mempunyai dana untuk mencapai akreditasi. Sementara bimbingan yang diadakan oleh dinas juga menyinggung masalah dana, dimana bimbingan diberikan dengan cara mengikuti diklat atau pelatihan, pelatihan yang diikuti tersebut dananya dari lembaga masing-masing. Sementara itu tidak semua Lembaga mempunyai dana untuk mengikuti diklat.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian deskriptif yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung) sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan Peranan Dinas Pendidikan dalam pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung) belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari masih belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas yaitu (1) penyusunan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai guru Desa Koto Tinggi mengatakan tidak adanya perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas. Hal ini dilihat bahwa Dinas telah melakukan sebuah Perencanaan

dalam bentuk Bimbingan teknis, sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan akreditasi (2) Dalam hal bimbingan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum melakukan bimbingan secara optimal ini dilihat dari tidak keseluruhannya Dinas melakukan pengawasi atau survei diseluruh lembaga, hal ini dilihat bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini belum mengawasi dan mesurvei. Hal ini mengakibatkan tidak mampu meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini. (3) kedisiplinan guru tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tidak adanya sanksi yang dilakukan, tetapi Dinas memberikan sanksi sementara guru-guru tidak mentaatinya. (4) pelatihan yang diberikan belum optimal dengan baik, seharusnya pelatihan harus dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Padang Tanggung sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Namun dalam hal ini Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi tidak mengikuti pelatihan tersebut. Ini dikarenakan Lembaga Desa Koto Tinggi tidak mampu mengikuti karena kurangnya dana. Hal ini membuktikan bahwa Dinas tidak memahami bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Desa Koto Tinggi tidak bisa mengikuti pelatihan.

2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi (Studi pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung) (1) masih lemahnya dalam perencanaan dimana perencanaan itu berupa bimbingan teknis, dan sosialisasi PAUD, dan meningkatkan akreditasi, namun dikarenakan sumber daya manusia rendah maka guru Koto Tinggi tidak menanggapi perencanaan yang dibuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2) masih lemahnya dalam Pendanaan dimana bimbingan yang diberikan berbentuk pelatihan, namun pelatihan dibuat oleh Dinas Desa Koto Tinggi tidak mengikutinya karna faktor dana (3) kurangnya pengawasan, karena pengarahan yang dilakukan oleh dinas berupa pengawasan, namun Desa Koto Tinggi tidak pernah dilakukan pengawasan (4) masih lemah dalam sebuah Pelatihan, bahwa guru-guru yang tidak berjenjang terakhir S1 PAUD diwajibkan mengikuti pelatihan sementara, guru Koto Tinggi yang tidak berjenjang S1 PAUD tidak mengikuti pelatihan.

## **B. Saran**

Dalam hasil kesimpulan yang telah diturunkan diatas tentang Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada Desa Koto Tinggi dan Desa Padang Tanggung), adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membimbing, mengarahkan, dan memberi Pelatihan lebih menekankan lagi peraturan yang dibuat, sehingga keberadaan sanksi di taati oleh guru lembaga Pendidikan Anak usia Dini Desa Koto Tinggi dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Padang Tanggung, dengan begitu tujuan dari Pembinaan tersebut seperti meningkatkan profesionalisme pendidik, meningkatkan kemampuan pengelola sebagai pendorong agar mampu menemukan dan melaksanakan pembaharuan dilembaga berjalan dengan baik.
2. Untuk guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini seharusnya dianggap penting Pendidikan Anak Usia Dini karena, pada usia dini otak anak berkembang sangat cepat, maka perlunya guru guru yang menganggap penting Pendidikan Anak Usia Dini agar terciptalah anak bangsa yang cerdas. Dan selain itu sangat Penting bagi guru-guru mengetahui Perencanaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk itu Lebih meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Dessler, Gary, 2009. *Organization Theory Integrating Structure And Behavior*, Prentice –Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Harmon, Michael 2006. *Organazation Theory For Public Administration*, Utle and Company
- Kaho, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mathis, Robert L, dan Jhon H Jakson, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Jakarta : Selemba Empat
- Moleong J, Lexy, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosdakarya
- Munaf, Yusri 2016. *Hukum administrasi Negara*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Musanef, 2000. *Sumber Daya Manusia Tinjauan kualitas dan Kerja*, Jakarta : Sinar Grafika
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Raja Grafindi Persada
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *kybernologi2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Ndraha, Talizidhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta
- Nadraha, Talizidhu, 2005. *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* Jakarta : Rineka Cipta
- Nurdiana, Jojoh, 2016. *Kurikulum dan Prgram Pembelajaran TK*, Bandung: PPPPTK TK dan PLB Bandung

- Patilima, Hamid, 2013. *Metode Penelitian Kulitatif*, Bandung : Alfabeta
- Poerwadarmita, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Rich, Dorothy, 2008. *Pengajaran dan Bimbingan Pra-Sekolah*, Jakarta : PT Indeks
- Syafiie, Kencana inu, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Syafii, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Mandar Maju
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, Jakarta : Raja Grafindo
- Supriyanto, Budi, 2009. *Manajemen Pemerintah (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*, Tangerang : Media Berlian
- Thota, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia* Jakarta : Raja Grafino Persada
- Widjaja, A.W, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wiwin Dinar Prastisi, 2008. *Psikologi Anak Usia Dini*, Jakarta : PT. Indeks
- Wahyuni, Sri, 2013. *Perencanaan Pembelajaran Bahasa Berkarakter*, Bandung:PT. Refika Aditama

## **Jurnal**

Rivai, Andi, 2017. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini Di Sulawesi Tengah*. Jurnal Pascasarjana Universitas Tadulako

Rahmadani, Suci, 2018. *Manajemen Peserta Didik Pada Taman Pendidikan AnakUsia Dini Do'a Ibu*. Jurnal Universitas Alauddin Makasar

Febriantha, Paristiawan, 2013. *Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Semarang*. Jurnal Universitas Diponegoro

Nurhazizah, 2016. *Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bagan Nibung Dikecamatan Kanan Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Universitas Riau

## **Dokumentasi:**

Undang- undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembinaan Pada Kursus Pelatihan

Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Peraturan Bupati No 41 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi